

KARAKTERISTIK PEMERINTAH, TEMUAN AUDIT DAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Berli Afriansyah¹, Fadli², Darman Usman³

¹*Institut Agama Islam Negeri Curup*

^{2,3}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu*

Abstract

This study aims to examine the effect of measures of government characteristics and audit findings on the financial performance of the district/city government of Bengkulu Province. The government characteristics observed consist of the size of government, regional wealth, dependence on central funds, administrative age, and balance funds.

The subjects in this study were regencies/cities in Bengkulu Province which consisted of 9 regencies and one city. The data collection technique in this research is document analysis, namely secondary data in the form of local government financial reports for 2011-2015. The data analysis technique used a multiple linear regression test.

The results showed that: government size, regional wealth, dependence on central funds, administrative age, balanced funds, and audit findings had no effect on financial performance in the Municipal / Regency government of Bengkulu Province..

Keywords: government characteristics, audit findings, local financial performance

1. Pendahuluan

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan berorientasi pada kepentingan publik. Hal tersebut menuntut pemerintah daerah menyusun laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik. Sehingga kinerja daerah sangat perlu diperhatikan serta ditingkatkan. Pengukuran kinerja daerah sangat penting untuk mengetahui kondisi pelaksanaan pemerintahan suatu daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Halacmi (2005) yang menyebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik. Melalui pengukuran kinerja pemerintah dapat mengetahui sejauh mana implementasi rencana yang telah ditargetkan dalam rencana anggaran.

Menurut Mahmudi (2005) fungsi dari pengukuran kinerja sebagai: (1) untuk memperbaiki kinerja pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, (2) pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan (3) mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menjadi indikasi kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam

menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kinerja keuangan daerah merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung sistem pemerintah daerah. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa belum semua daerah di Indonesia memiliki kinerja keuangan dalam menjalankan pemerintah belum berjalan maksimal. Salah satunya, pemerintahan Provinsi Bengkulu. Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA 2016 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa 8 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu memperoleh predikat opini WDP. Sehingga diperlukan peningkatan kinerja. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya karakteristik pemerintah daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa masing-masing pemerintah mempunyai karakteristik yang berbeda, baik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, dan wajib membuat laporan keuangannya sendiri.

Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lain (Poerwadarminta, 2006). Perbedaan karakteristik antar daerah satu dengan daerah lainnya diasumsikan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Senada dengan hal tersebut data empiris menunjukkan bahwa adanya pengaruh karakteristik pemerintahan terhadap kinerja daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Patrick (2007) menunjukkan bahwa karakteristik daerah mempengaruhi kinerja pemerintahan. Karakteristik-karakteristik tersebut seperti: (1) Ukuran Daerah, (2) Functional Differentiation, (3) umur dan (4) Dana Perimbangan/Intergovernmental Revenue.

Pentingnya karakteristik daerah dalam penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan yang tercantum dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. LPPD pemerintah daerah Kabupaten/Kota sangat tergantung dengan karakteristik dari masing-masing pemerintah daerah tersebut. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut.

Faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dana perimbangan dan temuan audit. Dana perimbangan merupakan salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Sebagai timbal baliknya, pemerintah daerah membelanjakan pendapatan transfer antar pemerintah sesuai dengan alokasi dan petunjuk anggaran yang sesuai dengan UU. Pemerintah pusat berharap dengan adanya transfer tersebut maka pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto et al. (2011) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara dana perimbangan dengan kesesuaian pengungkapan wajib pemerintah daerah. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan semakin besarnya intergovernmental revenue (dana perimbangan) maka kinerja yang dimiliki suatu pemerintah daerah akan semakin baik.

Berdasarkan kajian tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Adapun landasan pemikiran dalam penelitian digambarkan sebagai berikut.

2. Metode Penelitian

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan orang, kejadian atau sesuatu yang menarik yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh LKPD Kabupaten/Kota Propinsi Bengkulu tahun 2011-2015 yang telah diperiksa oleh BPK RI Berdasarkan populasi tersebut sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKPD Kabupaten/Kota di Propinsi Bengkulu tahun 2011-2015 yang telah diaudit yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah LKPD Kabupaten/Kota di Propinsi Bengkulu tahun anggaran 2011-2015 yang diperoleh dari BPK RI untuk mendapatkan data mengenai ukuran pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, ketergantungan pusat pemerintah daerah, dana perimbangan dan temuan audit.

3.2 Metode Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif, analisis asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis untuk menjelaskan hubungan variabel dalam penelitian yaitu Karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Bengkulu. Metode analisis menggunakan regresi linier dengan persamaan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 \text{ it} + \beta_2 X_2 \text{ it} + \beta_3 X_3 \text{ it} + \beta_4 X_4 \text{ it} + \beta_5 X_5 \text{ it} + \beta_6 X_6 \text{ it} + e$$

Keterangan :

Y : Kinerja Keuangan Pemerintah

α : Konstanta

β_1, \dots, β_6 : Koefisien Regresi

X1 : Ukuran Pemerintah

X2 : Kekayaan Daerah

X3 : Ketergantungan Pemerintah Pusat

X4 : Umur Pemerintah Daerah

X5 : Dana Perimbangan

X6 : Temuan Audit

E : Error

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Statistik Deskriptif

Ukuran Pemerintahan

Adapun deskripsi data ukuran pemerintah pada setiap Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu seperti tabel berikut.

Tabel 2. Deskripsi Ukuran Pemerintah

Kabupaten/Kota	Dalam Juta Rupiah		
	Min	Max	Mean
Kota	63152	220759	124810
Rejang Lebong	86925	181970	121357
Kepahiang	99238	184984	143289
Lebong	95939	184027	132131
Benteng	77494	197276	121723
BU	93796	172744	133253
Mukomuko	75261	189243	124313
Seluma	91214	213413	142084
BS	44997	163478	97593
Kaur	71749	234660	120291

Rata-rata ukuran daerah pada tahun 2010-2015 terbesar terdapat pada Kabupaten Kepahiang dengan rata-rata sebesar Rp 143289982972,17. Sedangkan rata-rata paling rendah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan jumlah aset senilai Rp 97593540257,00.

Kekayaan Pemerintah Daerah

Deskripsi data ukuran pemerintah pada setiap Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu tahun 2010-2015 seperti tabel berikut.

Tabel 2 Deskripsi Kekayaan Pemerintah

Kabupaten/Kota	Dalam Juta Rupiah		
	Min	Max	Mean
Kota Bengkulu	13137	29060	6703
Rejang Lebong	17894	64936	41503
Kepahiang	9639	28183	18532
Lebong	6255	17498	11565
Benteng	3137	19060	9603
BU	19099	52346	33147
Mukomuko	9034	42740	21235
Seluma	5519	27459	15266
BS	11894	51660	27129
Kaur	6046	24214	12448

Rata-rata kekayaan daerah yang ditinjau dari pendapatan daerah (PAD) terbesar terdapat pada Kabupaten Bengkulu Utara dengan rata-rata sebesar Rp 41503017687,33.

Ketergantungan kepada Pemerintah Pusat

Deskripsi data Ketergantungan kepada Pemerintah Pusat pada Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu tahun 2010-2015 seperti tabel berikut. Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata ketergantungan kepada pemerintah pusat yang ditinjau dari dana alikasi umum terbesar terdapat pada Kota Bengkulu dengan rata-rata sebesar Rp 57034736524,0 dan paling rendah pada Kabupaten Bengkulu Tengah dengan nilai sebesar Rp 9603312371,50.

Umur Administratif Pemerintah

Deskripsi data variabel umur administratif Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu seperti yang tersaji pada tabel 4.

Tabel 3 Deskripsi Ketergantungan kepada Pemerintah Pusat

Kabupaten/Kota	Dalam Juta Rupiah		
	Min	Max	Mean
Kota Bengkulu	26678	96768	57035
Rejang Lebong	17895	64937	41503
Kepahiang	9640	28184	18533
Lebong	6255	17498	11565
Benteng	3137	19060	9603
BU	19099	52347	33147
Mukomuko	9035	42740	21235
Seluma	5520	27459	15267
BS	11894	51660	27130
Kaur	6046	24214	12449

Tabel 4 Deskripsi Umur Administratif

Kabupaten/Kota	Dalam Tahun		
	Min	Max	Mean
Kota Bengkulu	291,00	296,00	293,5
Rejang Lebong	130	135	132,5
Kepahiang	7	12	9,50
Lebong	7	12	9,50
Benteng	2	7	4,50
BU	34	39	36,50
Mukomuko	7	12	9,50
Seluma	7	12	9,50
BS	61	66	63,50
Kaur	7	12	9,50

Usia administratif paling tinggi terdapat pada pemerintah Kota Bengkulu dengan rata-rata sebesar 293,5. Sedangkan usia pemerintah paling muda adalah Bengkulu Tengah dengan usia pada tahun 2015 selama 7 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan Kabupaten Termuda dengan usia pada tahun 2010 selama dua tahun.

Dana Perimbangan

Deskripsi data variabel dana perimbangan di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu seperti pada tabel 5. Data pada tabel 5 menunjukkan bahwa Kota Bengkulu memiliki rata-rata dana perimbangan paling tinggi yaitu sebesar Rp 561584024346,50. Sedangkan Kabupaten Lebong memiliki jumlah yang paling rendah yaitu sebesar Rp 389339928866,67. Hal ini mengindikasikan bahwa dana perimbangan setiap Kabupaten dan Kota tidak merata dengan disesuaikan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota.

Temuan Audit

Deskripsi data variabel temuan audit di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu seperti yang disajikan pada tabel 6.

Tabel 5 Deskripsi Dana Perimbangan

Kabupaten/Kota	Dalam Juta Rupiah		
	Min	Max	Mean
Kota Bengkulu	407308	675684	561584
Rejang Lebong	404817	665204	536176
Kepahiang	290608	502806	400090
Lebong	279513	500439	389340
Benteng	273886	551740	406203
BU	404610	778165	567182
Mukomuko	314241	604349	455951
Seluma	317599	596047	451795
BS	341656	602062	477635
Kaur	283264	662451	416843

Tabel 6 Deskripsi Data Temuan Audit

Kabupaten/Kota	Data Temuan		
	Min	Max	Mean
Kota Bengkulu	15,00	51,00	30,6667
Rejang Lebong	12	31	23,00
Kepahiang	10	28	20,00
Lebong	12	31	19,17
Benteng	8	23	14,50
BU	5	39	20,50
Mukomuko	6	35	16,67
Seluma	13	39	23,17
BS	10	21	16,83
Kaur	8	25	16,00

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa temuan audit paling tinggi oleh BPK pada tahun 2010-2015 adalah Kota Bengkulu dengan rata-rata jumlah temuan dalam 6 tahun terakhir sebanyak 30 temuan. Temuan paling banyak sebanyak 51 temuan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Deskripsi data variabel kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu seperti pada tabel berikut.

Tabel 7 Deskripsi Data Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota	Dalam Persen		
	Min	Max	Mean
Kota Bengkulu	92,56	101,11	98,5683
Rejang Lebong	98	103	100,55
Kepahiang	96	102	98,90
Lebong	96	102	98,34
Benteng	97	104	100,18
BU	100	108	102,31
Mukomuko	92	101	98,10
Seluma	91	102	97,48
BS	98	102	99,98
Kaur	97	101	99,05

Berdasarkan data deskriptif pada Tabel 7 menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah paling tinggi terdapat pada Kabupaten Bengkulu Utara dengan persentase sebesar 102,31 persen. Sedangkan kinerja paling rendah dengan rata-rata sebesar 97,48 persen terdapat di Kabupaten Seluma.

4.2. Hipotesis dan Pembahasan

Pengujian uji hipotesis dilakukan dengan uji regresi. Pengujian hipotesis dilakukan setelah memenuhi semua uji asumsi klasik. Adapun hasil dari analisis regresi linier berganda data panel dalam penelitian ini berdasarkan hasil output SPSS seperti pada tabel berikut.

Tabel 10 Hasil uji Regresi Linier

Variabel	Standardized Coefficients Beta	Hasil Uji	
		t	Sig
(Constant)	-16,302	-,230	0,819
X ₁ ->Y	,312	1,254	0,220
X ₂ ->Y	,055	,220	0,827
X ₃ ->Y	,100	,306	0,762
X ₄ ->Y	,123	,413	0,682
X ₅ ->Y	,044	,147	0,884
X ₆ ->Y	,073	,431	0,670

Berdasarkan tabel di atas maka model regresi yaitu $Y = -16,30 + 0,312x_1 + 0,55x_2 + 0,10x_3 + 0,12x_4 + 0,44x_5 + 0,07x_6 + e$. Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa semua variabel dependen, yaitu: kekayaan daerah, ukuran pemerintah, ketergantungan dana pusat, dana perimbangan, umur administrasi, dan temuan audit mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini ditunjukkan dari nilai t pada hasil uji positif.

Analisis hasil uji statistik F dilakukan untuk melihat apakah semua variabel independen dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dan model regresi yang digunakan signifikan atau layak. Adapun kriteria pengujian adalah : jika nilai probabilitas (sig.) kurang dari $\alpha=0,05$, maka model layak digunakan. Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,039 dan kurang dari $\alpha=0,05$. Hal ini menunjukkan pada tingkat kepercayaan 95% model dinyatakan signifikansi dan layak. Selain itu hasil ini juga menunjukkan adanya pengaruh secara bersama-sama variabel independen (karakteristik pemerintahan dan temuan audit) terhadap kinerja keuangan. Berikutnya koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R² sebesar 0,349, sehingga disimpulkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (karakteristik pemerintah dan temuan audit) sebesar 34,90%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar yang diteliti.

Hasil uji t digunakan untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis uji t untuk menjawab hipotesis penelitian yang telah disusun. Adapun hasil pengujian hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. Ukuran Pemerintahan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di pemerintah Kota/Kabupaten Propinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecil ukuran pemerintah tidak mempengaruhi kinerja keuangan di Kota/Kabupaten Propinsi Bengkulu. Kekayaan Pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di pemerintah Kota/Kabupaten Propinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan semakin tinggi PAD suatu daerah tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan daerah di Kota/Kabupaten Propinsi Bengkulu. Ketergantungan dana pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di pemerintah Kota/Kabupaten Propinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suatu daerah memiliki ketergantungan dana pusat maka tidak mempengaruhi baik tidaknya kinerja keuangan daerah di Kota/Kabupaten Propinsi Bengkulu. Umur administratif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di pemerintah Kota/Kabupaten Propinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi umur administrasi suatu daerah tidak meningkatkan kinerja

keuangan daerah di Kota/Kabupaten Propinsi Bengkulu. Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di pemerintah Kota/Kabupaten Propinsi Bengkulu. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan jumlah dana perimbangan tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah di Kota/Kabupaten Propinsi Bengkulu. Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di pemerintah Kota/Kabupaten Propinsi Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya temuan audit tidak mempengaruhi terhadap peningkatan atau penurunan kinerja keuangan di Kota/Kabupaten Propinsi Bengkulu.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: Ukuran Pemerintahan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di pemerintah Kota/Kabupaten Propinsi Bengkulu. Kekayaan Pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di pemerintah Kota/Kabupaten Propinsi Bengkulu. Ketergantungan dana pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di pemerintah Kota/Kabupaten Propinsi Bengkulu. Umur administratif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di pemerintah Kota/Kabupaten Propinsi Bengkulu. Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di pemerintah Kota/Kabupaten Propinsi Bengkulu. Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan di pemerintah Kota/Kabupaten Propinsi Bengkulu.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut: Pengumpulan data hanya terbatas pada data sekunder yang terdapat pada LRAPBD Kota/Kabupaten Bengkulu Tahun 2010-2015 dan data hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Kota/Kabupaten Bengkulu Tahun 2010-2015. Subjek penelitian hanya dibatasi pada Kabupaten/Kota di Propinsi Bengkulu sehingga data yang digunakan terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menambah alat pengumpulan data seperti wawancara dan kuesioner. Sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan secara jelas dan detail terkait variabel penelitian. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain penelitian yang secara teori dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

References

- Ghozali, Ahmad, (2011). Analisis multivariate dengan Aplikasi SPSS, Yogyakarta: Andi Offset
- Halachmi, Arie. (2005). Performance measurement is only one way of managing performance. *International Journal of Productivity and Performance Management*. Vol. 54: 502-516.
- Mahmudi, (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP AMP. YKPN
- Patrick P.A (2007). The determinant of Organizational innovativeness: The adoption of GASB 24 in Pennsylvania Local Government Unpublished Ph.D Dissertation Pennsylvania; The Pennsylvania state University
- Poerwadarminta, W.J.S. (2006). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Edisi ketiga. Jakarta : Balai Pustaka
- Sekaran, Uma. (2010). Research Methods For Business. Edisi IV. Jakarta: Salemba Empat.
- Suhardjanto, Djoko., & Yulianingtyas, Rena Rukmita. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah terhadap kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Auditing* Vol 8, No 1 November 2011
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.